

Diterima: 16 Feb 2026 Direvisi: 06 April 2026 Disetujui: 19 April 2026 Dipublikasi: 05 Juni 2026

ANALISIS EKONOMI ISLAM ATAS PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DALAM MEMBENTUK KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Rana Nadia Fitri^{1)*}, Madnasir²⁾, Agus Kurniawan³⁾

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi^{1)*}: rananadiafitri@gmail.com

Email²⁾: madnasir@radenintan.ac.id

Email³⁾: aguskurniawan@radenintan.ac.id

Abstrak

Kemiskinan multidimensi tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini harus diatasi melalui prinsip keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024 menggunakan regresi data panel pada 34 provinsi. Hasil menunjukkan bahwa pengangguran dan IPG berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan R² sebesar 48,59%. Temuan ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan multidimensi memerlukan perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kesetaraan gender, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: Kemiskinan Multidimensi, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender, Ekonomi Islam

EXPLORING THE NEXUS BETWEEN UNEMPLOYMENT, EDUCATION, AND GENDER DEVELOPMENT ON MULTIDIMENSIONAL POVERTY: INSIGHTS FROM ISLAMIC ECONOMICS

Abstract

Multidimensional poverty is a development issue that extends beyond income aspects, encompassing limited access to education, health, and a decent standard of living. From the Islamic economic perspective, poverty must be addressed through principles of justice, equity, and welfare. This study analyzes the influence of unemployment rate, education level, and Gender Development Index (GDI) on multidimensional poverty in Indonesia during the 2019–2024 period, both partially and simultaneously. Using a quantitative approach with secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) across 34 provinces, the analysis employs panel data regression with t-test, F-test, and coefficient of determination (R²). The results show that unemployment has a significant negative effect on multidimensional poverty, education has a negative but insignificant effect, and GDI has a significant negative effect. Simultaneously, the three variables have a significant influence, with an R² value of 48.59%. These findings indicate that reducing multidimensional poverty requires expanding employment opportunities, improving education quality, and strengthening gender equality—aligned with the Islamic economic principles of justice and social welfare.

Keywords: Multidimensional Poverty, Unemployment Rate, Education Level, Gender Development Index, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang layak (Wulandari dkk., 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang harus diatasi melalui prinsip keadilan (*al-'adl*), pemerataan distribusi (*tawazun*), dan kesejahteraan (*falah*). Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar di kalangan tertentu saja sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, serta mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]:60. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama pembangunan berkelanjutan dan inklusif karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Seiring perkembangan waktu, konsep kemiskinan mengalami perluasan makna. Kemiskinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan melalui pendekatan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang meliputi dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Sumargo & Simanjuntak, 2019). Meskipun pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, persoalan kemiskinan multidimensi masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang memicu deprivation pada berbagai aspek kesejahteraan (Amelia dkk., 2025).

Gambar 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013–September 2024

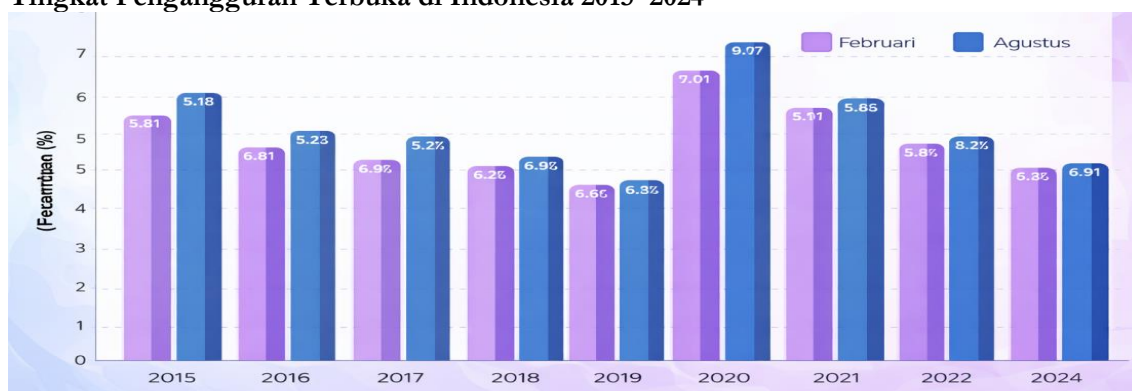


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 1, data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pendapatan pada September 2024 berada pada angka 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Namun demikian, masih terdapat sekitar 14 juta penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi dan belum sepenuhnya tercermin dalam indikator kemiskinan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan secara ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dengan memperhatikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat (Rahma dkk., 2024).

Kemiskinan multidimensi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, di antaranya tingkat pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal (Novriansyah, 2018). Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan mempersempit kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan multidimensi (Nursanty dkk., 2026).

Gambar 2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2015–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 2, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja suatu negara. BPS mencatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, TPT Indonesia cenderung menurun meskipun sempat berfluktuasi akibat pandemi COVID-19. Pada 2015, TPT masih berada di kisaran 5,81%–6,18% dan turun bertahap hingga 2019 mencapai 4,98%–5,23%. Tahun 2020 terjadi lonjakan hingga 7,07% akibat pandemi, kemudian berangsur membaik menjadi 6,26%–6,49% pada 2021. Penurunan berlanjut di 2022 sebesar 5,83%–5,86%, 2023 sebesar 5,32%–5,45%, hingga mencapai titik terendah 4,82%–4,91% pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja memiliki hubungan erat dengan kondisi kemiskinan di masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi kemiskinan yang masih terjadi meskipun tingkat pengangguran cenderung menurun menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. Islam tidak hanya menekankan pentingnya bekerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh penghidupan yang layak dan adil. Ketika sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, hal tersebut mencerminkan belum optimalnya distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan multidimensi dalam Islam tidak hanya bergantung pada penurunan pengangguran, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, dan perlindungan sosial agar tercapai kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*).

Pengangguran menjadi faktor penting dalam kemiskinan multidimensi karena individu yang tidak memiliki pekerjaan cenderung kehilangan sumber pendapatan, akses terhadap layanan dasar, serta perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan Wibowo (2023) yang menegaskan bahwa kesempatan kerja yang produktif dan layak merupakan instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, Arum dkk. (2025) menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus apabila

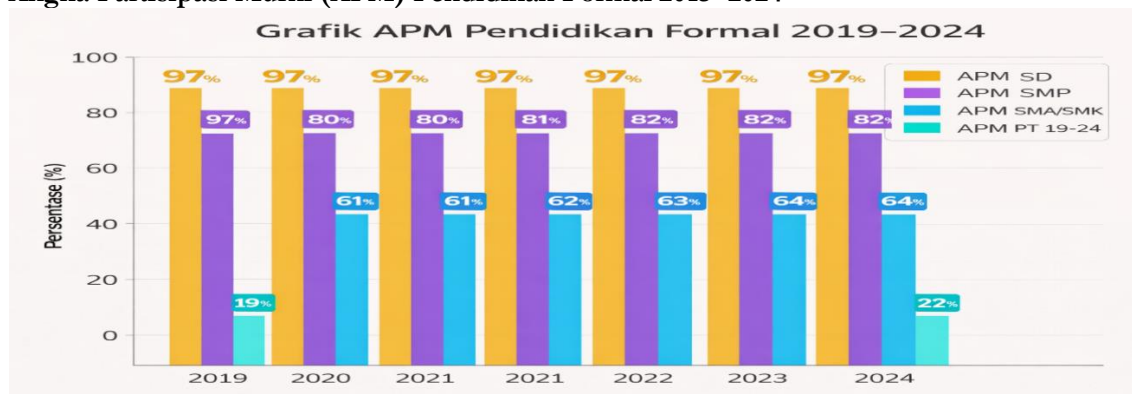
tidak diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam mendorong setiap individu untuk bekerja dan melarang sikap bermalas-malasan, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah SAW: “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri” (HR. Bukhari No. 2072). Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan, mempersempit akses terhadap kebutuhan dasar, serta berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain pengangguran, pendidikan juga memegang peranan strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih stabil (Gopar, 2025). Rendahnya tingkat pendidikan sering kali membatasi mobilitas sosial dan menjerat rumah tangga dalam pekerjaan informal berpenghasilan rendah (Wahyuni dkk., 2022). Selain dilihat dari perspektif ekonomi, peran pendidikan dalam menurunkan kemiskinan juga sangat kuat dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, pendidikan (ilmu) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara spiritual maupun material. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk membaca (Iqra’). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan kesejahteraan umat. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pendidikan dalam Islam berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan keterampilan, etos kerja, serta akses terhadap peluang ekonomi, sehingga individu dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak dan terhindar dari kemiskinan struktural; pendidikan juga membentuk akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, sehingga kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

Dengan demikian, sejalan dengan pandangan ekonomi modern, Islam juga memandang pendidikan sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membentuk individu yang mandiri, produktif, dan berakhlak, sehingga mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Gambar 3

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Formal 2015–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 3, Angka Partisipasi Murni (APM) cenderung menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. APM pada jenjang SD relatif stabil dan sangat tinggi, yaitu sekitar 97% pada tahun 2019 hingga 2024. APM SMP berada pada kisaran 80% (2019–2020), 81% (2021–2022), dan meningkat menjadi 82% (2023–2024). Pada jenjang SMA/SMK, partisipasi lebih rendah namun menunjukkan peningkatan bertahap, yaitu 61% (2019–2020), 62% (2021), 63% (2022), hingga 64% (2023–2024). Sementara itu, APM perguruan tinggi menjadi yang terendah, berkisar antara 19% (2019), 20% (2020), 21% (2021–2022), dan mencapai 22% (2023–2024). Kondisi ini menegaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi murid. Oleh karena itu, perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah atas serta perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan inklusif.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencerminkan kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Lestari, 2025). Ketimpangan gender dapat membatasi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dan pengambilan keputusan ekonomi, sehingga berdampak pada kesejahteraan rumah tangga (Fadila dkk., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, kesetaraan gender dimaknai sebagai keadilan dalam memberikan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan perannya. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pahala dan berkontribusi dalam kehidupan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl [16]:97. Ketimpangan gender dapat menghambat kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Gambar 4

Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 4, tren perkembangan IPG di Indonesia dapat diamati melalui perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014–2023 menunjukkan bahwa capaian IPM laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2014, skor IPM laki-laki tercatat sebesar 73,36, sedangkan perempuan 66,27. Selisih ini terus berlanjut hingga 2023 dengan IPM laki-laki mencapai 77,26 dan perempuan 70,96. Meskipun terdapat peningkatan pada kedua kelompok, laju pertumbuhan relatif serupa sehingga kesenjangan gender masih terlihat. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi kemajuan pembangunan manusia, perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang menghambat pencapaian kesetaraan penuh dalam pendidikan, kesehatan, maupun akses ekonomi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, namun sebagian besar masih dianalisis secara parsial. Misalnya, penelitian oleh Ulya dkk. (2025) serta Hakim dkk. (2025) menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, sementara Aryanti & Sukardi (2024) juga menegaskan bahwa pengangguran bersama variabel pendidikan dan kesehatan memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, Gopar (2025) menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan Khoiruddin dkk. (2024) mengkaji ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan yang berdampak pada peluang kerja. Dalam hal gender, penelitian oleh Lestari dkk. (2025) membahas Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator pembangunan manusia, namun belum secara langsung mengaitkannya dengan kemiskinan multidimensi. Selain itu, Arifin dkk. (2021) dan Arsyad (2025) lebih menekankan pada pemberdayaan perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi, tanpa mengintegrasikannya dalam analisis kuantitatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, kajian mengenai kemiskinan multidimensi telah dilakukan oleh Sumargo & Simanjuntak (2019) yang menyoroti pentingnya pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan. Namun, penelitian tersebut belum menggabungkan variabel pengangguran, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender dalam satu model empiris yang komprehensif. Lebih lanjut, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan periode data sebelum tahun 2019, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika terbaru, khususnya dampak pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi. Selain itu, kajian yang mengaitkan analisis empiris kemiskinan dengan perspektif ekonomi Islam masih terbatas, dan umumnya hanya bersifat konseptual. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara simultan menguji pengaruh pengangguran, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap kemiskinan multidimensi dengan menggunakan periode terbaru (2019–2024), serta belum terintegrasinya perspektif ekonomi Islam dalam analisis empiris tersebut.

Periode 2019–2024 menjadi fase penting dalam analisis kemiskinan multidimensi di Indonesia karena mencakup pandemi COVID-19, proses pemulihan ekonomi, serta implementasi berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024; serta (2) bagaimana hasil analisis tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan multidimensi baik secara parsial maupun simultan, serta menginterpretasikan hasilnya dalam kerangka ekonomi Islam guna memberikan kontribusi teoritis dan implikasi kebijakan yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan

Gender (IPG) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia selama periode 2019–2024 (Sahir, 2021). Penelitian dilaksanakan sejak September 2025 hingga selesai dan bersifat *desk research* dengan cakupan nasional, meliputi seluruh 34 provinsi di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi selama periode 2019–2024. Sampel berupa data tahunan dari 34 provinsi terkait variabel pengangguran, pendidikan, IPG, dan kemiskinan multidimensi selama periode tersebut, sehingga membentuk data panel yang representatif secara nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan *internet research*. Data yang digunakan merupakan data panel (*cross-section* dan *time series*) yang diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, serta laporan lembaga internasional seperti UNDP dan *World Bank*. Data primer berupa wawancara terbatas dengan pakar digunakan sebagai pendukung analisis untuk memperkaya interpretasi hasil penelitian.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti (Susianti, 2024). Identifikasi variabel membantu dalam menentukan alat ukur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Rumus
1	Tingkat Pengangguran (X1)	Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. Tingkat pengangguran mencerminkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja menyerap seluruh angkatan kerja (Aprodita & Sudibia, 2023). Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip <i>amal</i> (bekerja) dan <i>mastabah</i> , karena pengangguran dapat menghambat pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan (<i>falah</i>).	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
2	Tingkat Pendidikan (X2)	Tingkat pendidikan adalah pencapaian pendidikan formal yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusia (Fatah dkk., 2021). Pendidikan	a. Pendidikan Formal b. Pendidikan Informal	$I_{Pendidikan} = \frac{I_{EYS} + I_{MYS}}{2}$

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Rumus
		berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dalam Islam berkaitan dengan upaya mewujudkan <i>maslahah</i> dan kesejahteraan (<i>falah</i>).		
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (X3)	IPG adalah ukuran untuk menilai kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana capaian pembangunan perempuan mendekati laki-laki (Indrasetianingsih dkk., 2021). Kesetaraan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dalam Islam, yaitu pemberian hak dan kesempatan yang proporsional bagi laki-laki dan perempuan.	a. Angka Harapan Hidup b. Rata-rata Lama Sekolah c. Harapan Lama Sekolah d. Pengeluaran per kapita e. IPM menurut jenis kelamin	$IPG = \frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki-Laki}}$
4	Kemiskinan Multidimensi (Y)	Kemiskinan multidimensi adalah kondisi kemiskinan yang diukur bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga meliputi deprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Haris, 2017). Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan (<i>falah</i>) dan keadilan distribusi (<i>al-'adl</i>) dalam masyarakat.	a. Kesehatan (status gizi, angka kematian anak) b. Pendidikan (APS, lama sekolah) c. Standar hidup (akses air bersih, sanitasi, listrik, perumahan)	$MPI = H \times A,$ di mana H = persentase penduduk miskin multidimensi, A = rata-rata deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin multidimensi

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), yang pemilihannya ditentukan melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (Hutagulung & Darnius, 2022). Sebelum estimasi, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F), sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan multidimensi (Basuki, 2021). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data sehingga dapat menjawab tujuan penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap kemiskinan multidimensi di

Indonesia selama periode 2019–2024. Analisis data diawali dengan analisis statistik deskriptif, dimana analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi. Analisis ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi kemiskinan multidimensi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender di Indonesia berdasarkan data panel 34 provinsi selama periode 2019–2024. Hasil analisis deskriptif masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 2**Statistik Deskriptif Data**

	Tingkat Pengangguran	Tingkat Pendidikan	Indeks Pembangunan Gender	Kemiskinan Multidimensi
Mean	5.047255	9.206029	90.73245	1.791863
Median	4.680000	9.220000	91.06500	1.460000
Maximum	10.95000	11.49000	95.56000	7.170000
Minimum	1.570000	6.850000	79.59000	0.500000
Std. Dev.	1.709021	0.823460	3.150912	1.248260
Observations	204	204	204	204

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Berdasarkan statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian, yaitu pengangguran, pendidikan, Indeks Pembangunan Gender, dan kemiskinan multidimensi, memiliki jumlah observasi sebanyak 204 data tanpa adanya data hilang. Variabel pengangguran memiliki nilai rata-rata sebesar 5,05 dengan variasi data yang cukup beragam. Variabel pendidikan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 9,21 dengan penyebaran data yang relatif kecil, sehingga cenderung mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Variabel Indeks Pembangunan Gender memiliki nilai rata-rata sebesar 90,73 dengan tingkat variasi sedang. Sementara itu, variabel kemiskinan multidimensi memiliki nilai rata-rata sebesar 1,79 dengan tingkat penyebaran data yang cukup beragam.

Sebelum dilakukan analisis data, maka perlu dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling tepat dalam suatu penelitian dapat ditentukan melalui beberapa pengujian, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih tepat.

Tabel 3**Uji *Chow***

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	2.618332	(33,167)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	85.066986	33	0.0000

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga model yang tepat berdasarkan Uji *Chow* adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Pengujian selanjutnya Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Tabel 4**Uji *Hausman***

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.096192	3	0.0001

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa hasil Uji *Hausman* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0001. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Pengujian terakhir adalah uji LM yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Adapun hasil Uji *Lagrange Multiplier* disajikan sebagai berikut:

Tabel 5**Uji Lagrange Multiplier (LM)**

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	17.24441 (0.0000)	0.000352 (0.9850)	17.24476 (0.0000)

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Nilai probabilitas pada komponen cross-section sebesar $0.0000 < 0.05$, sehingga model yang direkomendasikan oleh Uji LM adalah *Random Effect Model*. Namun, karena Uji *Chow* dan Uji *Hausman* sama-sama memilih *Fixed Effect Model*, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Sebelum dilakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang merupakan prasyarat regresi, meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 6**Uji Multikoleniaritas dengan Fixed Effect Model**

	Tingkat Pengangguran	Tingkat Pendidikan	Indeks Pembnagunan Gender
Tingkat Pengangguran	1	0.207	0.177
Tingkat Pendidikan	0.207	1	0.328
Indeks Pembangunan Gender	0.177	0.328	1

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa seluruh koefisien korelasi berada di bawah 0.85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Adapun hasil pengujian heterokedastisitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 7**Uji Heterokedastisitas dengan Fixed Effect Model**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0.557950	0.593153	-0.940650	0.3482
Tingkat Pengangguran	0.000562	0.074536	0.007545	0.9940
Tingkat Pendidikan	-0.016779	0.026378	-0.636115	0.5256
Indeks Pembangunan Gender	0.011425	0.006967	1.639779	0.1029

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai probabilitas pada variabel pengangguran sebesar $0,9940 > 0,05$, variabel pendidikan sebesar $0,5256 > 0,05$, dan variabel Indeks Pembangunan Gender sebesar $0,1029 > 0,05$. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, serta untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F). Adapun hasil pengujian parsial dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 8**Uji Parsial dengan *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Nilai
C	14.84783	2.258143	6.575240	0.0000	
Tingkat Pengangguran	-0.113950	0.053552	-2.127841	0.0348	
Tingkat Pendidikan	-0.068820	0.098284	-0.700211	0.4848	
Indeks Pembangunan Gender	-0.130574	0.026348	-4.955675	0.0000	
F-statistic					4.383642
R-squared					0.485855
Adjusted R-squared					0.375021

Sumber: EViews 13, diolah 2025

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Dengan demikian, hipotesis pengangguran dan hipotesis pendidikan ditolak, sedangkan hipotesis Indeks Pembangunan Gender diterima:

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia

Variabel tingkat pengangguran (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0348 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.113950 . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024, namun dengan arah pengaruh negatif. Dengan demikian, H1 ditolak, karena hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia

Variabel tingkat pendidikan (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.4848 > 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.068820 . Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024. Oleh karena itu, H2 ditolak, meskipun arah hubungan variabel pendidikan terhadap kemiskinan multidimensi bersifat negatif.

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia

Variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.130574 . Hal ini menunjukkan bahwa IPG berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024. Dengan demikian, H3 diterima.

Pengaruh Variabel Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia

Berdasarkan Tabel 11, nilai probabilitas $0.000000 < 0.05$ menunjukkan bahwa

seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, sehingga H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara lebih terperinci. Nilai R^2 sebesar 48.59% menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi kemiskinan multidimensi sebesar 48.59%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan Multidimensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemiskinan multidimensi. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh adanya intervensi pemerintah selama periode 2019–2024, khususnya pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Berbagai program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berperan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi deprivasi pada dimensi dasar kehidupan. Secara empiris, peningkatan anggaran perlindungan sosial melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai lebih dari Rp695 triliun pada tahun 2020 berkontribusi terhadap stabilitas konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang sempat meningkat menjadi 10,19% pada tahun 2020, namun kemudian menurun menjadi sekitar 9,36% pada tahun 2023. Selain itu, penelitian Salsabila dkk. (2024) menunjukkan bahwa bantuan sosial efektif dalam menjaga konsumsi rumah tangga kelompok desil terbawah serta menurunkan tingkat keparahan kemiskinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi tidak hanya ditentukan oleh status pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar. Dengan kata lain, intervensi pemerintah mampu meredam dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan, sehingga hubungan antara keduanya tidak selalu bersifat linear. Hal ini sejalan dengan penelitian Hakim dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial yang efektif dapat melemahkan pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, moral, dan keadilan. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga tingginya pengangguran mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan kerja. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menuntut adanya pemerataan akses ekonomi bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan itu, Sari dkk. (2024) menjelaskan bahwa pengangguran dalam ekonomi Islam merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui kebijakan yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Selain itu, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Secara empiris, pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan dampak nyata, di mana penghimpunan zakat nasional yang terus meningkat mencapai lebih dari Rp30 triliun pada tahun 2023 telah dimanfaatkan untuk program konsumtif dan produktif. Program zakat

produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus mengubah status penerima menjadi pemberi zakat. Selain itu, pemanfaatan wakaf produktif dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, fenomena hubungan negatif antara pengangguran dan kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kombinasi intervensi kebijakan pemerintah dan mekanisme distribusi sosial, baik konvensional maupun berbasis syariah. Dalam perspektif Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep *takaful ijtima'i* (jaminan sosial), di mana negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan kelompok rentan. Oleh karena itu, pengangguran dan kemiskinan tidak selalu memiliki hubungan langsung, melainkan dipengaruhi oleh efektivitas sistem perlindungan sosial dan distribusi kesejahteraan yang diterapkan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan Multidimensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan formal belum tentu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kondisi *low-quality education* dan *jobless growth* di Indonesia, di mana peningkatan jumlah lulusan pendidikan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Data menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan, di mana meskipun akses pendidikan sudah luas, kualitasnya masih relatif rendah dan belum sepenuhnya mampu menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, terjadi fenomena *education-job mismatch*, di mana banyak lulusan bekerja tidak sesuai dengan bidang atau tingkat pendidikannya. Studi menunjukkan bahwa sekitar 50% lulusan perguruan tinggi dan lebih dari 55% lulusan vokasi mengalami *over-education* atau ketidaksesuaian pekerjaan selama periode 2019–2023 (Khoiruddin dkk., 2024). Bahkan, pada lulusan SMK ditemukan sekitar 61,58% mengalami *mismatch* horizontal, yaitu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2019–2024 juga belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga memunculkan fenomena *jobless growth*. Meskipun tingkat pengangguran menurun dari sekitar 7,1% pada tahun 2020 menjadi 4,9% pada tahun 2024, kondisi pasar tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan dengan produktivitas rendah (Jayadiwinata & Hutabarat, 2026). Penurunan proporsi pekerja formal serta meningkatnya pekerja informal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkualitas dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja terdidik bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga peningkatan pendidikan tidak secara langsung berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan multidimensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan formal tanpa kualitas dan relevansi tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan, sehingga hubungan antara pendidikan dan kemiskinan menjadi tidak signifikan. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Khoiruddin dkk. (2024) dan Ulya dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja menyebabkan pendidikan tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk

memperoleh ijazah formal, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata (*maslahah*) bagi individu dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip *hifz al-'aql* dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal melalui ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu dalam Islam merupakan kewajiban, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan ilmu tersebut harus diamalkan agar memberikan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, pendidikan dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* apabila ilmu yang diperoleh mampu memberikan manfaat berkelanjutan, seperti meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, apabila pendidikan hanya berhenti pada perolehan ijazah tanpa diiringi pemanfaatan ilmu secara produktif, maka tujuan kemaslahatan tersebut tidak tercapai.

Pemikiran cendekiawan ekonomi Islam kontemporer seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf menegaskan bahwa pendidikan seharusnya berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang ideal tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan *itqan* (profesionalisme dan kompetensi kerja) sehingga individu mampu berkontribusi secara produktif dalam perekonomian. Tanpa kualitas tersebut, pendidikan tidak akan mampu mengurangi ketimpangan maupun kemiskinan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan empiris dalam penelitian ini serta didukung oleh penelitian Ulya dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan sering kali tidak signifikan dalam jangka pendek, terutama ketika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan baru akan efektif sebagai alat pengentasan kemiskinan apabila mampu menghasilkan manusia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki keterampilan yang relevan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan Multidimensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Secara empiris, selama periode 2019–2024, peran perempuan di Indonesia semakin signifikan dalam mendukung kesejahteraan rumah tangga, terutama melalui peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Perempuan tidak hanya berperan dalam sektor domestik, tetapi juga aktif sebagai pelaku usaha mikro, pekerja informal, serta kontributor pendapatan keluarga. Data menunjukkan bahwa sekitar 64,5% hingga 80% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan, yang berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga dan perekonomian nasional (Arsyad, 2025).

Selain itu, berbagai program pemerintah turut mendorong pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat utama, sehingga meningkatkan kontrol perempuan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut memperluas peluang usaha bagi Perempuan (Arifin dkk., 2021). Dengan demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Gender mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan kemiskinan multidimensi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai

kesamaan mutlak (*equality*), melainkan sebagai keadilan yang proporsional (*equity*). *Equality* menekankan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu, sedangkan *equity* dalam Islam menekankan pemberian hak, peran, dan kesempatan secara adil sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab, dan situasi yang dihadapi. Islam memberikan ruang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, namun tetap memperhatikan keseimbangan peran yang sesuai dengan prinsip keadilan, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nahl [16]:97 yang menegaskan bahwa setiap amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh balasan yang setara di sisi Allah.

Lebih lanjut, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan konsep *karamah insaniyyah* (martabat manusia), di mana setiap individu memiliki potensi yang harus dihargai dan dioptimalkan. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa perempuan sebagai bagian dari separuh populasi tidak mengalami marginalisasi, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki tidak terbuang sia-sia (*mubazir*). Dalam kerangka ini, pemberdayaan perempuan merupakan bentuk optimalisasi sumber daya insani yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, kesetaraan berbasis keadilan dalam Islam tidak hanya menjamin hak perempuan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Aryanti & Sukardi (2024) yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, terutama melalui peningkatan akses ekonomi dan pendidikan bagi perempuan.

Pengaruh Secara Simultan Variabel Independen terhadap Kemiskinan Multidimensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan multidimensi merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan hampir setengah variasi kemiskinan multidimensi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, serta akses terhadap layanan publik.

Meskipun secara simultan berpengaruh signifikan, secara parsial tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan, seperti variabel pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model simultan, setiap variabel memiliki peran yang saling melengkapi, namun secara individu masih dipengaruhi oleh berbagai fenomena, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pengaruh terhadap kemiskinan multidimensi tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan hasil interaksi dari berbagai aspek ekonomi dan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan multidimensi sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Kemiskinan multidimensi tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyangkut kelima aspek tersebut secara simultan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan menghambat penjagaan akal (*hifz al-'aql*), rendahnya kualitas kesehatan berdampak pada penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*), keterbatasan ekonomi memengaruhi penjagaan harta (*hifz al-mal*), sementara kondisi sosial yang rentan dapat berdampak pada

keberlangsungan keturunan (*hifẓ an-nasl*) serta praktik keberagamaan (*hifẓ ad-din*). Dengan demikian, kemiskinan multidimensi pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Penciptaan lapangan kerja berkontribusi pada penjagaan harta (*hifẓ al-mal*), peningkatan kualitas pendidikan memperkuat penjagaan akal (*hifẓ al-'aql*), sementara pemberdayaan perempuan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender mendukung penjagaan keturunan (*hifẓ an-nasl*) dan kesejahteraan keluarga secara luas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *falah* (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil dan optimalisasi potensi manusia. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan multidimensi bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara holistik dan berkelanjutan sesuai dengan kerangka *Maqashid Syariah*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Salecker dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial secara simultan, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dalam penanganannya, peneliti juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya mencakup aspek pendapatan, tetapi juga berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang saling berkaitan. Dengan demikian, baik secara empiris maupun dalam perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia pada periode 2019–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan multidimensi, sehingga H1 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran tidak selalu meningkatkan kemiskinan multidimensi, yang diduga dipengaruhi oleh kebijakan perlindungan dan bantuan sosial pemerintah.

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, sehingga H2 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum mampu menurunkan kemiskinan multidimensi secara langsung tanpa dukungan kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan multidimensi, sehingga H3 diterima. Peningkatan pembangunan gender terbukti berkontribusi pada penurunan kemiskinan multidimensi. Secara simultan, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan IPG berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, dengan kemampuan penjelasan model sebesar 48,59%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil empiris ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan multidimensi tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan (*falah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Pengangguran perlu diatasi melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, pendidikan harus mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, serta kesetaraan gender perlu diperkuat sebagai bagian dari optimalisasi potensi manusia secara menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif menggunakan regresi data panel dengan perspektif ekonomi Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan multidimensi tidak hanya dari sisi empiris, tetapi juga dari nilai-nilai normatif Islam.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel yang masih terbatas, serta pengukuran tingkat pendidikan yang hanya menggunakan satu indikator sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini belum memasukkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kebijakan fiskal yang juga berpotensi memengaruhi kemiskinan multidimensi.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lebih beragam, menggunakan indikator pendidikan yang lebih komprehensif, serta memperluas analisis dengan pendekatan kualitatif atau mixed methods. Selain itu, kajian selanjutnya juga dapat memperdalam analisis ekonomi Islam dengan memasukkan variabel instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi.

REFERENCES

- Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(1), 01–23. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.76>
- Aprodita, B. D., & Sudibia, I. K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(11), 2158–2169. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i11.p05>
- Arifin, I. P., Wulan, T. R., & Lestari, S. (2021). Perempuan Dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan). *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.360>
- Arsyad, E. (2025). Peran Perempuan Dalam Kegiatan Ekonomi Melalui Sektor Umkm Di Galesong Kabupaten Takalar. *Edusos: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 02(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.477>
- Arum, E. L., Heryanto, B., & Dewandaru, B. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Kediri Tahun 2019—2023. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 4(1), 321–325. <https://doi.org/10.47233/jemb.v4i1.2944>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Rajagrafindo Persada.
- Fadila, D., Ghofur, R. A., & Devi, Y. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i2.20876>
- Fatah, A., Suhaili, M., & Farida, I. (2021). Analisis Indikator Pendidikan: Partisipasi Pendidikan di Indonesia Periode 1994-2018. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian*

- Rana Nadia Fitri, Madnasir, Agus Kurniawan..... Analisis Ekonomi Islam Atas Pengangguran, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Gender Dalam Membentuk Kemiskinan Multidimensi
dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 7(3), 555.
<https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3516>
- Gopar, O. A. (2025). Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30616–30619.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32066>
- Hakim, Y. A. L., Purwanto, & Pudail, M. (2025). Unemployment And Poverty Dynamics: A Panel Data Analysis In The Province With The Lowest Poverty In Indonesia. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(5), 734–747.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/t4snry04>
- Haris, M. (2017). Penghitungan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Paradigma*, 5(3), 132–143.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jp.v5i3.436>
- Hutagulung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis regresi data panel dengan pendekatan CEM, FEM dan REM (studi kasus IPM Sumatera Utara 2014–2020). *FARABI Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 3(2), 217–227.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- Indrasetianingsih, A., Fitriani, F., & Kusuma, P. J. (2021). Klasifikasi Indeks Pembangunan Gender Di Indonesia Tahun 2020 Menggunakan Supervised Machine Learning Algorithms. *Inferensi*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v4i2.10940>
- Jayadiwinata, N. K., & Hutabarat, R. E. (2026). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatra. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 12(1), 550–563.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5853>
- Khoiruddin, M. A., Setyanti, A. M., Suman, A., Prasetyia, F., & Susilo, S. (2024). Exploring Determinants of Education-Job Mismatch Among Educated Workers in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 263–281.
<https://doi.org/10.23917/jep.v25i2.23994>
- Lestari, P. (2025). Pemodelan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menggunakan Pendekatan Metode Regresi Probit Biner Di Kabupaten/Kota Pulau Sumatera Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Matematika*, 13(22), 83–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/mathunesa.v13n3.p149-155>
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59.
<https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>
- Nursanty, I. A., Yusuf, Y. M., AR, M., Irawan, F., Wanto, M., Fhadilah, A., & Furnawati, R. (2026). *Ekonomi Syariah*. Dikti Press.
- Rahma, K., Nurfatimah, S., Syafira, I. N., Nuraini, I., & Desmawan, D. (2024). Dinamika Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Tahun 2023. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(2), 187–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Salecker, L., Ahmadov, A. K., & Karimli, L. (2020). Contrasting Monetary and Multidimensional Poverty Measures in a Low-Income Sub-Saharan African Country. *Social Indicators Research*, 151(2), 547–574. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02382-z>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of*

- Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Sari, Y. K., Rizkiyan, A., & Apriza. (2024). Pengangguran dalam Perspektif Islam. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1(3), 90–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v1i2.185>
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 360–368.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2019.10>
- Susianti, O. M. (2024). Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 9(1), 18–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37728/jpr.v9i1.1066>
- Ulya, S. K., Rindiani, R., Masitoh, G., Oktaviani, C. D., & Rezola, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 100–123.
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2171>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Wibowo. (2023). *Standarisasi Upah Minimum*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3217. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1347>